

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan tingkatan terendah yang ada dalam sebuah pemerintahan. Menurut Widjaja, (2010) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai peranan yang sangat penting karena desa menjadi target pembangunan nasional. Adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu “mengatur mengenai kewenangan urusan desa ditambah dengan adanya alokasi dana desa dapat membuka peluang bagi setiap desa di Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.”

Berdasarkan data BPS tahun 2021, terdapat 83.843 desa yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut tidak salah jika pemerintah memiliki komitmen untuk membangun Indonesia melalui desa. Peran desa sangat penting karena mengingat desa sebagai tumpuan bagi pembangunan nasional. Seiring dengan hal tersebut maka perlu dilakukannya edukasi terhadap masyarakat desa agar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Edukasi terhadap masyarakat desa sangat perlu untuk menjadikan desa tersebut menjadi desa cerdas, salah satu solusi inovatif adalah dengan melakukan penerapan konsep *smart village*. Konsep dari *smart village* di sini mengadopsi dari

beberapa konsep yang dimiliki *smart city*, namun dalam *smart village* skala konsepnya lebih kecil. Pada dasarnya konsep dan dimensi dalam pengukuran *smart village* belum banyak dikemukakan dibanding dengan *smart city*.

Smart village bagi desa bukanlah sebuah program yang hanya berfokus kepada kelancaran akses untuk masyarakat, melainkan juga berfokus kepada bagaimana sistem yang dijalankan oleh aparat desa untuk menjalankan peranan penting demi kemajuan desa. Menurut Nur Saidah, (2021) konsep *smart village* yang dianggap identik dengan kemampuan suatu desa dalam mengoptimalkan digitalisasi teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya perbaikan kualitas hidup, efisiensi, serta meningkatnya kapabilitas desa baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya program *smart village* menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat karena masyarakat merasa mendapat keadilan dalam sektor pelayanan publik yang dianggap akan lebih transparan dan efisien.

Penerapan atau pelaksanaan program *smart village* tentunya tidak semudah pelaksanaan program *smart city* pada kota. Adanya perbedaan antara ciri-ciri masyarakat desa dan kota, hal tersebut ditinjau dari dua unsur. Pertama, masyarakat, rata-rata masyarakat yang tinggal di kota cenderung memiliki pengetahuan yang lebih dari pada masyarakat desa terutama dalam hal teknologi dan perkembangan zaman. Masyarakat desa cenderung menerapkan prinsip asalkan dapat makan untuk bertahan hidup saja itu sudah cukup. Adanya prinsip tersebut tentunya membuat masyarakat desa bersifat tertutup dengan hal-hal baru sehingga sulit untuk maju. Kedua, pemerintah. Rata-rata sumber daya aparatur yang bekerja di lingkup Pemerintah Kota lebih mempunyai pengalaman daripada Pemerintah Desa dan juga

melihat dari karier pekerjaan dan pendidikan biasanya lebih tinggi orang yang berada di Pemerintah Kota. (Hidayah, 2011)

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, (2021) yaitu adapun upaya untuk mewujudkan Indonesia maju di masa depan, yaitu perlunya ada kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi bagi desa. Adanya konsep *smart village* dalam desa tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan berbagai aspek pembangunan desa. Terdapat enam pilar dari program *smart village*, diantaranya yaitu:

1. Warga cerdas (*smart people*);
2. Mobilitas cerdas (*smart mobility*);
3. Pemerintah cerdas (*smart governance*);
4. Ekonomi cerdas (*smart economic*);
5. Pola hidup cerdas (*smart living*);
6. Lingkungan cerdas (*smart environment*).

Program *smart village* sangat penting diterapkan di desa. Hal tersebut karena desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Konsep *smart village* menjadi representasi yang terbaru untuk warga desa dalam bersinergi antara budaya lokal dengan sistem informasi teknologi. Adanya konsep *smart village* disini tentunya memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku sosial warga desa untuk aktif pada saat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perubahan sosial kemasyarakatan akan terbentuk seiring berjalannya waktu, hal tersebut karena disebabkan oleh disrupsi era. Adanya

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai dasar program *smart village* dan defenisi dari *smart village* yang sesuai pada pasal 78 UU Desa tentunya adanya keseriusan pemerintah pusat untuk menggencarkan program *smart village* ini ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

71% dari jumlah masyarakat Indonesia tinggal di desa sehingga tidak salah adanya komitmen dari pemerintah untuk membangun Indonesia melalui desa. Adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa tentunya menjadi sebuah proses pengembalian kepercayaan pemerintah pusat kepada desa dimana selama ini menjadi objek pembangunan baik itu dari pemerintah kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya asas rekognisi dan asas subsidiaritas sebagai upaya nyata untuk mewujudkan kemandirian setiap desa. Terdapat 5 kategori desa, diantaranya desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal. Saat ini pemerintah melalui menteri desa terus menekankan agar lebih banyak lagi desa mandiri yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu aktor perubahan, Pemerintah Desa harus mampu menerapkan program-program terkait dengan *smart village* kepada masyarakat, baik itu program yang dibuat Pemerintah Kota, maupun yang dibuat Pemerintah Desa itu sendiri. Salah satu bentuk dari *smart village* yaitu adanya Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa merupakan sebuah sistem yang dapat mengelola sumber daya yang ada di sebuah organisasi (Ranggoaini, 2012). Sistem Informasi Desa adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Hadirnya Sistem Informasi Desa memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan dan ketersediaan data. Selain itu keberadaan Sistem Informasi Desa juga bagian

dari pengembangan *e-government*, yaitu adanya aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah desa untuk mendokumentasikan data yang ada di desa (Sulistiyowati, 2021).

Keberadaan Sistem Informasi Desa tentunya memberikan manfaat baik itu manfaat untuk pemerintah desa maupun untuk masyarakat (Arifah, 2018). Adapun manfaatnya yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi
2. Memberi kemudahan untuk mengakses informasi terkait desa
3. Peningkatan terhadap akuntabilitas dan transparansi
4. Memudahkan masyarakat dalam bekerja sama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan menguntungkan
5. Memperluas jangkauan informasi

Selain adanya manfaat juga terdapat fungsi dari Sistem Informasi Desa (Arifah, 2018), antara lain yaitu:

1. Media informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat
2. Sebagai alat untuk mengelola data desa
3. Memberi kemudahan dalam mengelola informasi sumber daya desa dan kawasan pedesaan
4. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah keuntungan bagi desa untuk mengelola data yang ada di Desa. Dalam UU tersebut

terdapat pada pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan disebutkan yaitu:

“(1) Desa berhak menerima informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kota/pemerintah kabupaten kota. (2) Dewan Negara dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan pedesaan. (3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi objek perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. (4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat informasi desa, informasi pembangunan desa, kawasan perdesaan dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan perdesaan. (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan tersedia bagi masyarakat desa dan semua kelompok kepentingan. (6) Informasi perencanaan disediakan oleh pemerintah daerah/pemerintah kota.”

Menurut Widiyastuti (dalam Sulistyowati, 2021) Sistem informasi desa kompatibel dengan pengembangan desa pintar. Konsep *smart village* merupakan pengembangan dari *smart city*, yaitu kota yang mempunyai kemampuan mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan kota dengan solusi baru, integratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sistem Informasi Desa yang disebutkan dalam UU tidak dijelaskan secara spesifik bahwa sistem ini disediakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, namun sistem ini tercipta atas prakarsa masyarakat desa, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola dan

diberikan kepada masyarakat desa untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan merupakan tanggung jawab pemerintah desa.

Desa Kalisidi merupakan desa yang terletak di Kabupaten Semarang. Desa Kalisidi sudah mempunyai Sistem Informasi Desa dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Sistem Informasi Desa tersebut berisi profil desa yang terdiri atas sejarah desa, visi dan misi, serta struktur organisasi desa. Data desa yang terdiri dari data wilayah administratif, data pendidikan, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, dan data warga negara. Regulasi yang terdiri dari produk hukum dan informasi publik. Serta yang terakhir yaitu terdapat layanan desa yang terdiri dari pembuatan akte kematian, pembuatan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Usaha, dan pembuatan Surat Permohonan Perubahan KK.

Dari berbagai macam indikator yang ada pada Sistem Informasi Desa Kalisidi, dari hasil temuan peneliti masih terdapat kekurangan dalam Sistem Informasi Desa Kalisidi tersebut, diantaranya yaitu data wilayah administratif dan sejarah desa yang masih kosong, data pendidikan yang sedang ditempuh dan data pekerjaan baru di isi oleh 1 orang dan 6244 orang terdapat kalimat belum mengisi. Kemudian pada visi dan misi yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa yaitu bertuliskan visi dan misi Desa Senggigi, padahal desa tersebut bernama Desa Kalisidi. Dari permasalahan Sistem Informasi Desa tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi karena melihat dari adanya indikator-indikator yang

masih kosong, belum terisi maksimal, dan adanya kejanggalan dalam nama desa pada indikator visi misi.

Dari permasalahan tersebut, analisis indikator kemungkinan masih ditemukannya kekurangan dalam data isi, layanan masih belum dapat digunakan, dan kesalahan penulisan visi misi dari Sistem Informasi Desa Kalisidi hal tersebut karena belum adanya kejelasan dan keseriusan dari Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa Kalisidi, selain itu masih rendahnya tata kelola pemerintahan dari Pemerintah Desa sehingga masih adanya kesalahan dalam penulisan visi misi dan data desa yang belum *update* bahkan kosong. Maka dari itu, dalam permasalahan yang ada dengan melakukan analisis terhadap implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi nantinya akan menjawab bagaimana pelaksanaan dari Sistem Informasi Desa Kalisidi, sehingga nantinya akan ditemukan penyebab dari permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi. Kemudian dari itu, penelitian

ini juga diharapkan dapat memenuhi atau melengkapi penelitian yang sebelumnya dilakukan dan juga dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan bagi yang membahas mengenai topik yang serupa.

2. Praktis

Penelitian yang dibuat diharapkan mampu menjadi referensi untuk mampu mengimplementasikan Sistem Informasi Desa dengan baik. Dari upaya yang dilakukan diharapkan dapat di implementasikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar dapat merasakan kemudahan dengan adanya Sistem Informasi Desa ini. Dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri juga merasakan manfaat praktis tersendiri, diantaranya:

a) Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan Sistem Informasi Desa dan juga sebagai evaluasi pemerintah terhadap Implementasi Sistem Informasi Desa apakah sudah berjalan dengan baik atau belum

b) Bagi masyarakat desa

Masyarakat desa juga dapat merasakan manfaat dan kemudahan secara langsung dari adanya Sistem Informasi Desa, seperti keperluan data, mengurus pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), akta kelahiran, dan informasi terkait kegiatan desa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

- a. Arifah, (2018) berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik”

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Kebumen yang memfokuskan kepada bagaimana implementasi, dampak, dan faktor-faktor yang terpengaruh atas implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan dimana hasilnya yaitu implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara efektif. Hal tersebut karena belum adanya koordinasi yang baik antar OPD yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi Desa. Adanya faktor penghambat dari implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen yaitu kurangnya pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Desa dan juga rendahnya pembiasaan terhadap teknologi.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama memiliki kefokuskan dalam meneliti bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa, nantinya akan mengetahui apa saja permasalahan dan bagaimana keberjalanan Implementasi Sistem Informasi Desa tersebut berjalan. Selain itu adanya kesamaan dalam metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana Implementasi penelitian terdahulu ini dilakukan

secara umum di Kabupaten Kebumen dan tidak memfokuskan kepada salah satu desa saja. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus kepada salah satu desa saja. Selain itu pada penelitian terdahulu ini implementasi Sistem Informasi Desa yang dilakukan tidak ada melibatkan masyarakat dalam penelitian, penelitian ini hanya fokus terhadap pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Namun, untuk penelitian yang peneliti lakukan nantinya akan melibatkan masyarakat dalam proses wawancara, karena dibuatnya Sistem Informasi Desa tersebut tentunya merupakan untuk kepentingan bagi masyarakat juga.

- b. Anwar & Sujai, (2020) berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran”

Penelitian tersebut membahas mengenai Sistem Informasi Desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Peneliti melakukan penelitian terhadap desa yang ada di Kabupaten Pangandaran apakah desa tersebut sudah mempunyai Sistem Informasi Desa atau belum. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwasanya dari 94 desa terdapat 42 desa yang sudah mempunyai Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pangandaran. Dari 42 desa tersebut diambil satu desa sebagai sampel yaitu Desa Bojong. Dalam penelitian di Desa tersebut terdapat menu data desa, peta desa, dan berita desa dimana ini merupakan bentuk dari transparansi informasi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dari hasil penelitian juga ditemukan permasalahan dalam Implementasi Sistem Informasi Desa, yaitu kurangnya operator komputer, jaringan telekomunikasi yang belum baik, dan Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana sama-sama melakukan analisis terhadap implementasi Sistem Informasi Desa yang mana nantinya akan menemukan bagaimana keberjalanan Sistem Informasi Desa tersebut serta permasalahan yang menjadi penghambat proses implementasinya, kemudian selain itu adanya kesamaan dalam metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana pada penelitian terdahulu ini mendata semua desa di Kabupaten Pangandaran terkaitt desa apakah sudah mempunyai Sistem Informasi Desa atau belum dan kemudian mengambil salah satu desa sebagai sampel, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu langsung memilih salah satu desa di Kabupaten Semarang yang sebelumnya sudah dilakukan peninjauan ke desa tersebut untuk memastikan apakah desa tersebut sudah menggunakan Sistem Informasi Desa atau belum. Selain itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa sampel tersebut hanya meneliti permasalahan Sistem Informasi Desanya sehingga membuat belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Desa tersebut, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus terhadap Sistem Informasi Desanya mulai dari kondisi, kualitas, sumber daya, dan masalah yang ada pada Sistem Informasi Desa.

- c. Asiah, Sihabudin, & Yuliani, (2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa di Imbanagara yang belum optimal. Dalam penelitian tersebut memfokuskan kepada 3 poin, yaitu bagaimana implementasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Sistem Informasi Desa di Desa Imbanagara. Adapun hasil penelitiannya yaitu belum optimalnya implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa yaitu karena masih minimnya manfaat yang diterima masyarakat, terbatasnya SDM aparatur desa, dan minimnya koordinasi antara pengelola website dengan dinas komunikasi dan informatika sebagai penyedia website desa.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Desa dimana pada dilatar belakangi oleh adanya temuan terkait permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya Sistem Informasi Desa tersebut dan kemudian melakukan penelitian apa yang menjadi hambatan atas permasalahan tadi. Adanya kesamaan dalam metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dimana pada penelitian terdahulu ini terkait dengan sumberdaya hanya meneliti dari pemerintah saja sedangkan dari masyarakat sebagai tidak ada apakah masyarakat tersebut paham terkait dengan petunjuk dari sistem informasi desa atau tidak.

- d. Ponto, Pioh, & Tasik, (2016) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Wanea Kota Manado”

Pada penelitian tersebut membahas mengenai implementasi terhadap kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan, yang biasa disingkat dengan PBL-MAPALUSE yang mana program ini merupakan program andalan dari Walikota dan Wakil Walikota Manado. Tujuan dibuatnya program ini yaitu untuk meningkatkan prasarana fisik dalam mendorong kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan peningkatan dalam sosial masyarakat melalui peningkatan terhadap kapasitas sumber daya masyarakat sehingga dapat mengembangkan perekonomian keluarga.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori dari Charles O. Jones yang berisi tentang model implementasi kebijakan diantaranya ada organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada topik pembahasannya, dimana peneliti membahas mengenai sistem informasi desa, sedangkan penelitian terdahulu ini tentang pembangunan berbasis lingkungan.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. Implementasi Kebijakan

Grindle (dalam Andani, 2019) mendefinisikan Implementasi merupakan suatu proses manajemen umum yang dapat dipelajari pada tataran program tertentu. Proses implementasi dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana aksi telah dibuat, dan sumber daya telah dibuat serta dialokasikan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan bagian yang erat kaitannya dengan implementasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari implementasi. Evaluasi

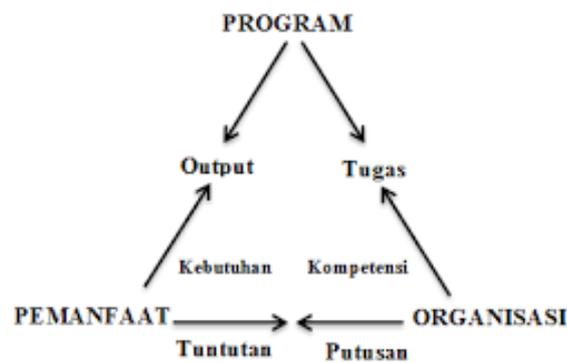
program sangat dipengaruhi oleh banyak faktor penting seperti kualitas masukan, kualitas proses, dan kualitas hasil pelaksanaan. Diasumsikan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain masukan, proses, dan keluaran atau hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program adalah suatu rancangan tentang asas-asas dan usaha-usaha yang akan dilakukan.

Kebijakan adalah komponen utama dalam tercapainya kegiatan implementasi, sedangkan unsur keduanya adalah kelompok masyarakat yang merupakan sasaran dari program. Kebijakan yang dilaksanakan jika tidak memberikan manfaat, perubahan, dan peningkatan kepada masyarakat sehingga dapat disebut bahwasanya program tersebut gagal karena berhasil atau gagalnya kebijakan diimplementasikan atas komponen atau unsur pelaksanaannya. Dalam mencapai implementasi kebijakan yang efektif pemerintah harus melakukan tindakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta penghimpunan sumber dana. Adapaun luaran yang didapatkan dari tindakan pertama yaitu disebut sebagai proses implementasi kebijakan, sedangkan kedua disebut dengan input kebijakan. (Andani, 2019).

Menurut David C. Korten (dalam Bahri, Sujanto, & Madhakomala, 2020) terdapat model pengoperasian implementasi program. Model pendekatan yang digunakan yaitu dari proses pembelajaran yang biasa disebut dengan model kesesuaian dengan implementasi program. Model kesesuaian implementasi program tersebut digambar sebagai berikut:

Gambar 1.1

Model kesesuaian implementasi program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan, (2020)

Terdapat 3 elemen inti dalam implementasi program, diantaranya yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran dari program. Suatu program disebut berhasil diimplementasikan jika ketiga elemen implementasi tersebut kompatibel. Pertama adalah kesesuaian program dengan penerima manfaatnya, yaitu kesesuaian antara apa yang program yang direncanakan dengan apa yang dibutuhkan oleh khalayak sasaran (penerima manfaat). Kedua adalah kesesuaian antara program dan kelompok pelaksana, yaitu adanya kesesuaian antara tugas yang diberi isyarat oleh program dengan kualitas kelompok pelaksana. Ketiga adalah kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dan kelompok pelaksana, yaitu adanya kesesuaian antara persyaratan yang ditetapkan organisasi untuk mencapai hasil program dan apa yang dapat dikerjakan oleh kelompok sasaran program.

Pola yang dikembangkan oleh Korten tersebut jika ada ketidaksesuaian antara ketiga unsur pelaksanaan program, maka program tersebut akan gagal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena jika luaran program berseberangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas luaran tersebut tidak bisa digunakan. Jika organisasi pelaksana program tidak dapat melakukan tugas-tugas yang diminta oleh program, organisasi tidak dapat memberikan hasil program secara memadai. Kelompok sasaran tidak akan menerima penyampaian program karena kelompok sasaran tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan organisasi pelaksana program. Konsistensi antara ketiga unsur penyampaian program sangat penting untuk melaksanakan program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. (Bahri, 2020)

Implementasi Kebijakan juga dikemukakan oleh Said Zainal Abidin yaitu suatu upaya yang begitu penting dalam proses kebijakan. Jika tidak ada implementasi, maka sebuah kebijakan hanya sebatas dokumen dan tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa model dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Faktor-Faktor Pendukung

a. Kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi

Sebuah kebijakan akan berkualitas serta dapat diimplementasikan dengan baik dapat ditentukan oleh bebrbagai elemen, diantaranya:

- Tujuan yang ingin dicapai atau alasan dibuatnya kebijakan tersebut apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Kriteria tersebut ada dua,

yaitu tujuan itu bisa diterima dengan akal sehat (rasional) dan menyangkut kepentingan masyarakat (diinginkan).

- Asumsi yang digunakan dalam perumusan kebijakan atau kebijakan tersebut tidak mengada-ada
- Lengkap dan benarnya informasi yang digunakan

b. Sumber daya

- Manusia, yaitu pihak-pihak yang berpartisipasi atau terlibat dalam proses implementasi kebijakan baik itu dari aparatur pemerintah maupun masyarakat.
- Keuangan, yaitu ketentuan terkait peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui diawal. Ketentuan mana biasanya dibuat oleh instansi atau pihak lain diluar yang berwenang melakukan pengeluaran.
- Informasi, yaitu penyampaian terkait kebijakan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- Legitimasi, yaitu persetujuan atasan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan. Suatu kebijakan dibuat demi kepentingan masyarakat maka dari itu peran masyarakat dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan.

2. Analisis Pola Implementasi

Adapun 2 konsep dasar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Konsep tentang peralatan kebijakan, yaitu langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Peralatan kebijakan berkaitan dengan sumber daya manusia, terutama pada sumber daya aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah disini sebagai subjek sekaligus objek dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut terkait dengan beberapa aspek, diantaranya yaitu tingkat pendidikan, tingkat gaji, tingkat dan pola hidup masyarakat, dan budaya kerja. Aspek yang paling utama disini adalah berkaitan dengan tingkat gaji atau upah yang memengaruhi kerja dari aparatur pemerintahan.
- b. Konsep kekuasaan yang tersedia untuk implementasi, yaitu. kekuasaan tertentu yang dipegang oleh pihak lain yang secara formal diakui untuk menggunakan sarana yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini kewenangannya berkaitan dengan jabatan di organisasi yang bersangkutan.

3. Masalah Implementasi

Dalam implementasi kebijakan tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan maksimal karena sesungguhnya implementasi kebijakan lebih susah daripada sekadar merumuskannya. Banyak pengaruh yang muncul sehingga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones (dalam Ponto, Pioh, & Tasik, 2016) terdapat 3 model yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Pengorganisasian

Adanya kejelasan dalam struktur organisasi tentunya dibutuhkan untuk mengoperasikan program, dengan itu tenaga pelaksana bisa terbentuk dari sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Terdapat 3 aspek dalam organisasi, yaitu sumber daya, unit organisasi, dan metode.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut, sehingga para pembuat kebijakan harus mampu menyampaikan kepada penerima kebijakan agar dapat dipahami dengan baik. Menurut Jones mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan diterapkan dengan benar, maka pedoman dan pedoman pelaksanaannya tidak hanya harus dapat diterima, tetapi juga harus jelas, dan jika tidak jelas maka pelaksana akan bingung harus berbuat apa.

3. Penerapan atau Aplikasi

Menurut Jones aplikasi merupakan ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika dapat dilaksanakan atau dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka hanya sebagai tumpukan kertas belaka.

Dari penjelasan implementasi kebijakan menurut para ahli, teori yang relevan dengan implementasi dari penelitian yang akan dilakukan yaitu teori menurut Charles O. Jones yaitu terdapat 3 model dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Teori tersebut nantinya akan dapat

menjawab permasalahan dalam penelitian penulis diantaranya bagaimana sistem organisasi untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Desa tersebut agar dapat berjalan, bagaimana dalam interpretasi apakah pembuat kebijakan memahami kebijakan tersebut dan apakah adanya penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat juga memahami kebijakan tersebut, serta aplikasi atau penerapannya apakah sudah berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Desa Kalisidi, penulis menggunakan konsep menurut Charles O. Jones (dalam Ponto, Pioh, & Tasik, 2016) sebagai berikut:

1. Organisasi

Organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan karena dalam hal ini organisasi berperan sebagai pelaksana kebijakan. Adanya kejelasan dalam struktur organisasi akan dapat memperlancar sebuah implementasi. Maka dari itu organisasi harus ada dalam implementasi kebijakan. Adapun indikator yang mewakili variabel organisasi diantaranya yaitu:

- a. Sumber daya
- b. Unit-unit organisasi / unit kerja
- c. Metode

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi akan dapat berjalan dengan lancar jika kebijakam tersebut diinterpretasikan dengan baik, jika tidak maka penerima kebijakan tidak akan memahami apa kebijakam yang akan dijalankan. Adapun indikator yang mewakili variabel interpretasi yaitu:

- a. Kejelasan penyampaian kebijakan kepada masyarakat
 - b. Upaya penyampaian kepada masyarakat
 - c. Pemahaman pelaksana kebijakan terkait kebijakan tersebut
3. Aplikasi atau penerapan

Implementasi kebijakan yang baik merupakan implementasi kebijakan yang mampu diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika implementasi tersebut tidak dapat berjalan dalam penerapannya maka sama saja kebijakan tersebut gagal di implementasikan. Adapun indikator yang mewakili variabel aplikasi yaitu:

- a. Keberjalanan dan kondisi Sistem Informasi Desa
- b. Manfaat yang diterima oleh masyarakat
- c. Kendala dalam penerapan

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Saifullah & Tabrani, (2015) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran

menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, menyajikan laporan rinci yang diperoleh dari sumber informan, dan dilakukan dalam lingkungan alam.

Pemilihan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif ini dilakukan sebab dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Kalisidi sesuai dari data yang didapatkan dari informan.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini yaitu di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Adapun alasan peneliti memilih Desa Kalisidi sebagai situs penelitian adalah karena desa tersebut cukup mewakili kriteria untuk dilakukan pengambilan sampel karena Desa Kalisidi sudah memiliki Sistem Informasi Desa, kemudian dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti masih ada data yang kosong, data belum *update*, dan layanan *online* belum bisa digunakan, sehingga peneliti memilih desa tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan terhadap Sistem Informasi Desa.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek yang akan dituju peneliti untuk penelitian yaitu masyarakat Desa Kalisidi dan Pemerintah Desa Kalisidi, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, staf atau admin Sistem Informasi Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalisidi sebagai lembaga pengawas desa. Pada penelitian ini penentuan teknik subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* sebagaimana

menurut Sugiyono, (2019) bahwasanya *purposive sampling* adalah salah satu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan melakukan berbagai pertimbangan.

1.7.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa kualitatif. Menurut Bungin, (2007) data kualitatif merupakan jenis data berupa kalimat, uraian, atau bisa jadi pola berupa cerita pendek. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa kata-kata, uraian, dan sumber data tertulis lainnya yang dianggap relevan. Data-data tersebut didapatkan dari subjek dan objek penelitian.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pada data primer ini data didapatkan secara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya didapatkan saat melakukan penelitian tanpa adanya perantara dengan melakukan wawancara, observasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan penyebaran. Pada penelitian ini data primer yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan observasi dengan subjek penelitian

b. Data Sekunder

Pada data sekunder ini data didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya didapatkan dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan laporan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu dari hasil penelitian terdahulu, buku, dan artikel jurnal.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Menurut Sugiyono, (2019) “Teknik pengumpulan data observasi dapat digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan apabila jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *participant observation* dan *non participant observation*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan proses pelaksanaan pengumpulan data *non participant observation*, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam proses pelaksanaannya, peneliti mengamati bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan Sistem Informasi Desa.

b. Wawancara

Sugiyono, (2019) menjelaskan bahwa “wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada saat ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta mengetahui hal yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit”. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden terkait implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono, (2019) dalam penelitian kualitatif untuk analisis data dimulai pada saat pengumpulan data dan setelah berakhirnya pengumpulan data selama jangka waktu tertentu. Setelah peneliti mulai melakukan wawancara, ia menganalisis jawaban yang diberikan responden. Jika jawabannya kurang memuaskan, peneliti dapat terus bertanya hingga informasi yang dianalisis dianggap dapat diandalkan.

Pada penelitian ini model analisis yang digunakan peneliti yaitu model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada saat melakukan penelitian data yang didapatkan jumlahnya bisa dikatakan banyak, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan secara lebih teliti dan terperinci. Semakin lama peneliti bekerja di lapangan, maka semakin kaya, kompleks, dan rumit pula data yang mereka terima. Oleh karena itu analisis data harus segera dilakukan atau melalui reduksi data. Reduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal penting dan mencari tema serta pola. Setelah reduksi selesai, maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengajukan permohonan kembali jika diperlukan. (Sugiyono, 2019)

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk diagram, uraian singkat, *flowchart*, dan juga hubungan lintas kategori. Penyajian data memudahkan pemahaman peristiwa yang terjadi dan juga

penyusunan rencana kerja selanjutnya sesuai pemahaman yang telah didapatkan. (Sugiyono, 2019)

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Pada tahap terakhir ini, kesimpulan dalam penelitian kualitatif berkemungkinan dapat menjawab apa yang diawal menjadi rumusan masalah penelitian kita, namun bisa jadi juga tidak, hal tersebut seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara serta bisa berkembang pada saat penelitian di lapangan. (Sugiyono, 2019)